



FOTO: FOTO: DOK

Pemberdayaan perempuan berdasarkan potensi dan keinginan wilayah.

Yulianingsih

Pemerintah Kota Yogyakarta sangat konsisten dalam pemberdayaan perempuan di wilayahnya. Bahkan di ruang publik, Pemkot Yogyakarta memberi ruang yang cukup luas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah itu untuk memegang tampuk pemerintahan. Di tingkat satuan kerja misalnya, beberapa kali PNS perempuan di Kota Yogyakarta menjabat sebagai kepala dinas antara lain Kepala Dinas Pariwisata, Yulia Rustianingsih. Bahkan asisten Sekretaris Daerah Pemkot Yogyakarta juga ada yang perempuan, Triik Sulastri.

Kepemimpinan perempuan juga ada di tingkat kelurahan. Terbukti dari 45 kelurahan di Yogyakarta 12 di antaranya dipimpin perempuan. Bahkan dari 14 kecamatan satu di antaranya dipimpin camat perempuan. Bagi Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto, perempuan memang memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat.

Peran mereka tidak bisa dibedakan dengan peran laki-laki. "Perempuan memiliki peran yang strategis dalam pembangunan masyarakat bukan hanya tingkat keluarga saja tetapi juga lingkungan dan pemerintah," paparnya.

Atas dasar itulah, Pemkot Yogyakarta jauh-jauh hari terus membangun kebijakan dan program yang memberikan ruang yang cukup luas bagi pemberdayaan peran perempuan di ranah publik. Menurut Kepala Kantor Pemberdayaan Wanita dan Perempuan Pemkot Yogyakarta, Sri Adiyanti, pemberdayaan perempuan di Yogyakarta didasarkan atas potensi dan keinginan wilayah. Pemberdayaan tersebut dilakukan di semua lini kehidupan baik aspek, sosial, ekonomi, politik maupun pendidikan.

Dari aspek ekonomi misalnya, pihaknya sejak tahun 2009 melakukan pendampingan terhadap kelompok ibu-ibu di beberapa wilayah di Yogyakarta. Mereka didampingi untuk melakukan produksi yang bernilai ekonomi baik itu kerajinan maupun kegiatan ekonomi lainnya. Pendampingan dilakukan bukan hanya dari sisi permodalan semata, tetapi juga pendampingan pemasaran bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, pendampingan inovasi desain dan pemasaran serta pendampingan manajemen keuangan sederhana bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi.

Dina

2. Wakil Walikota Yogyakarta

3. Sekretaris Daerah

4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	
1.
2.
3.
4.
5.

Hingga tahun 2011 ini, kata dia, setidaknya ada tujuh rintisan usaha kelompok ibu-ibu di tujuh kelurahan di Yogyakarta. Ketujuh kelompok tersebut adalah kelompok usaha Batik "Jenggolo" (batik pewarna alami) di Pandeyan, Umbuharjo; kelompok Surya Mandiri (konveksi dan kerajinan tangan) di Suryodiningrat, Mantrijeron; kelompok Kemuning 10 (pengolahan sampah non organik) di Tegalpanggung Danurejan.

Selain itu, juga kelompok Batik "TOEGOE" (Batik) di Kecamatan Jetis; kelompok "IMOED" (Sulam Pita dan Payet) di Rejowinangun, Kotagede; kelompok Mugji Lancar (Kuliner) di Purbayan Kotagede; dan kelompok Sor Salam (kerajinan tempurung) di Prawirodirjan. "Pendampingan kita lakukan berdasarkan potensi wilayah. Ini kita ambil dari hasil usulan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)," terang Sri Adiyanti yang biasa dipanggil Entik.

Menurut Pih Kasie Perlindungan Kelayakan Rentan, Istikhomah, tahun 2011 ini masing-masing kelompok usaha tersebut diberikan modal dari APBD setempat sebesar Rp 5 juta kecuali kelompok Sor Salam yang hanya memperoleh dana Rp 4 juta karena rintisan usaha baru dilakukan tahun 2011 ini.

Selain bidang ekonomi, beberapa program lain juga digulirkan Pemkot termasuk bidang sosial dan pendidikan. Hanya saja program tersebut banyak meneruskan program dari pemerintah pu-

sat dan meneruskan program yang sudah ada. Antara lain, program peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) dan program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2PKK).

Di bidang politik kata Entik, pihaknya akan intensif melakukan pelatihan bagi para perempuan di tingkat wilayah terutama kader PKK agar bisa melakukan analisa kebutuhan dan potensi kebutuhan perempuan itu sendiri di tingkat wilayah dan bisa menyuarakan itu ditingkat Musrenbang wilayah. "Kita dorong kader perempuan di wilayah untuk bisa menyampaikan pendapat yang tahu kebutuhan dan masalah perempuan itu ya perempuan sendiri. Kalau perempuan tidak bisa menyuarakannya maka tidak akan ada pemberdayaan maupun penyelesaian," paparnya.

Sejak tahun 2008 lalu, kata Entik, pihaknya terus melakukan pelatihan intensif terkait hal itu kepada kader-kader PKK tingkat wilayah. Hasilnya berdasarkan penelitian Bappeda Yogyakarta, partisipasi perempuan di Musrenbang Kota Yogyakarta meningkat tajam dari hanya 17 persen tahun 2007 menjadi 21 persen pada tahun 2009. Ke depan, partisipasi perempuan di Musrenbang menurutnya tidak cukup, pihaknya akan mendorong adanya penyusunan anggaran yang memiliki perspektif gender.

Dengan begitu, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perempuan di Yogyakarta akan

lebih terbuka di semua lini. "Kita akan melakukan pelatihan terhadap sekretaris SKPD dan teman dan Bappeda, sehingga perencanaan anggaran ke depannya akan semakin berspektif terhadap gender," tandasnya.

Posisi tawar kuat

Sementara itu, pengamat sosial politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito mengatakan, perempuan memiliki posisi tawar politik kuat namun belum dimanfaatkan secara tepat sebagai suatu kekuatan. "Secara demografis, jumlah penduduk perempuan adalah 55 persen dari populasi rata-rata penduduk Indonesia. Meskipun jumlahnya besar, tetapi posisi tawar perempuan ini belum dimanfaatkan secara tepat," kata Arie saat Sarasehan Peningkatan Hari Kartini dengan tema Peran Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Menentukan Masa Depan Kota Yogyakarta di di Balai Kota Yogyakarta, beberapa hari lalu.

Menurut dia, agar posisi tawar perempuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat, maka basis pemilih perempuan harus mampu menjadi pemilih yang cerdas dan terkonsolidasi dengan baik untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang bersih, jujur dan dilakukan sesuai kaidah demokrasi yang benar. Sebagai pemilih yang cerdas, lanjut dia perempuan diharapkan mampu memengaruhi praktek politik uang. ■ ed: heri purwata

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005